



**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD PROV. JATENG**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES  
ANGGOTA FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH  
MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN  
SIDANG 2025/2026**

Disampaikan Oleh :

**MUH RIZQI ISKANDAR MUDA**

Semarang, 24 November 2025

**FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2025**



**FRAKSI PARTAI GERINDRA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretariat: Jl. Pahlawan No. 7 Kota Semarang, Telp: 024-8456802



***Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam***  
***Indonesia Raya***

***Yth.*** Saudara Gubernur Jawa Tengah;

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD  
Provinsi Jawa Tengah;

Jajaran eksekutif, Rekan-rekan wartawan dan Hadirin tamu  
undangan yang berbahagia.

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dengan salah satu agenda Laporan Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025/2026.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan tempat kepada Fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses ini.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Sidang Pertama, Tahun 2025/ 2026 didasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 tahun 2022, tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengunjungi Masyarakat/ konstituen di Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah demi menjalankan salah satu fungsi lembaga legislatif yaitu pengawasan dengan memantau kegiatan-

kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Wilayah Daerah Pemilihan.

2. Menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat secara langsung dengan menggelar forum bersama dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait dengan potensi, hambatan maupun kesulitan di daerah-daerah, sehingga tercipta keselarasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan roda Pemerintahan.
3. Melengkapi dan menyempurnakan berbagai informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi serta mensosialisasikan produk-produk kebijakan yang sudah diputuskan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.

### **C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Reses dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 Oktober 2025, bertempat di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Tengah.

## **II. HASIL RESES**

***Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Anggota Dewan yang Kami Hormati dan Hadirin yang berbahagia***

Kegiatan reses yang telah dilaksanakan selama delapan hari kerja telah berlangsung dengan baik, adapun hasil dari peninjauan ke lapangan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat dilaporkan sebagai berikut:

### **1. BIDANG PEMERINTAHAN**

- Fraksi Gerindra menegaskan pentingnya koordinasi lintas daerah dalam optimalisasi PAD, terutama dalam menghindari kebocoran sektor pajak, seperti Pajak Air Permukaan, serta memastikan seluruh potensi pendapatan dicatat dengan tepat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
- Masyarakat menilai perlunya kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota

untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Fraksi Gerindra mendukung langkah pemerintah dalam membangun sistem kolaboratif, termasuk mendorong optimalisasi pelayanan Samsat dan digitalisasi pembayaran pajak agar lebih efisien dan akurat.

## **2. BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

- Kesepakatan KUA–PPAS APBD 2026 yang baru saja ditandatangani pada 20 November 2025 memuat arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan tahun 2026. Dalam KUA–PPAS 2026, Pemerintah Provinsi menempatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai prioritas utama dimana sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian pangan.
- Tren produksi pangan di beberapa daerah seperti Karanganyar dan Sukoharjo menunjukkan peningkatan, sejalan dengan program ketahanan pangan nasional. Aspirasi petani mengarah pada kebutuhan penguatan akses air, irigasi, pompa, serta mitigasi perubahan iklim yang berpotensi menghambat produksi pertanian.
- Berdasarkan data BPS Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2025, sektor pertanian terus tumbuh dan menyerap tenaga kerja terbesar, dengan kenaikan 0,21 juta pekerja. Bahkan Nilai Tukar Petani (NTP) Jateng pada September 2025 tercatat 116,84, tertinggi di Pulau Jawa. Aspirasi petani di lapangan menyoroti tantangan alih fungsi lahan, hama, dan ketimpangan distribusi air irigasi. Sehingga petani berharap adanya revitalisasi jaringan irigasi primer–sekunder–tersier, penambahan pompa air, penyediaan benih unggul dan jaminan harga panen yang stabil.

## **3. BIDANG PEREKONOMIAN**

- Fraksi Partai Gerindra menyoroti pengendalian inflasi perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan meningkatkan kebutuhan

bahan baku pangan secara signifikan. Kenaikan permintaan terhadap komoditas protein hewani khususnya ayam berpotensi menjadi sumber inflasi. Oleh karena itu, Fraksi menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai, menjaga ketersediaan dan stabilitas harga, sehingga pelaksanaan MBG tidak menimbulkan lonjakan harga yang berdampak pada daya beli masyarakat.

#### **4. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

- Isu upah menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan. Buruh dan pelaku usaha sama-sama berharap proses penetapan UMP/UMSP berlangsung terbuka, berbasis data, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.
- Fraksi Partai Gerindra menekankan agar terus menjalin komunikasi lebih intens antara pemerintah daerah, serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan Dewan Pengupahan menjadi masukan penting dari masyarakat, agar keputusan upah tidak menimbulkan ketegangan antar pihak.
- Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa penetapan UMP harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing kabupaten/kota.

#### **5. BIDANG SOSIAL**

Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa program pengurangan angka kemiskinan dengan cara melaksanakan kegiatan perencanaan anggaran secara terpadu antar OPD untuk menggerakkan potensi desa miskin yg ada di Jawa Tengah dgn melihat potensi desa masing masing, juga menyelaraskan program kerja pemerintah Jateng sehubungan dengan pembangunan manusia dengan program pemerintah pusat.

#### **6. BIDANG PENDIDIKAN**

- Fraksi Partai Gerindra mencermati kebijakan BOSDA yang kini

difokuskan hanya kepada peserta didik dari keluarga miskin khususnya desil 1 dan desil 2. Arah kebijakan ini pada dasarnya sejalan dengan upaya pemerataan pendidikan, namun Fraksi memandang penting memastikan bahwa pengurangan cakupan BOSDA tidak menimbulkan biaya baru bagi siswa di sekolah negeri. Fraksi menegaskan agar perubahan skema BOSDA harus tetap menjaga prinsip bahwa sekolah negeri tetap tidak berbayar, terutama bagi kelompok rentan.

## **7. BIDANG EKONOMI, UMKM & KOPERASI**

- Para pelaku UMKM secara konsisten mengusulkan aspirasi agar kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pemasaran digital, serta pembinaan koperasi desa.
- Menurut data Pemprov Jateng, penyaluran KUR mencapai Rp41,4 triliun untuk lebih dari 791 ribu debitur. Dengan adanya kebijakan KUR tanpa agunan hingga Rp100 juta, pelaku UMKM merasakan angin segar. Namun aspirasi masyarakat masih menyoroti syarat administrasi yang dirasa memberatkan, minimnya pendampingan bank penyalur dan kurangnya pelatihan manajemen usaha.
- Perkembangan Koperasi Merah Putih masyarakat melihat bahwa banyak koperasi di daerah belum mampu berjalan optimal akibat terbatasnya modal awal dan minimnya pelatihan teknis. Masyarakat meminta pemprov memperkuat koordinasi dengan BUMN/ BUMD untuk memastikan pasokan barang, pendampingan penyusunan rencana bisnis, serta akses pembiayaan.
- Fraksi menyoroti untuk koperasi perlu program pembinaan yang lebih terarah dari Pemerintah Provinsi, termasuk peningkatan sosialisasi, pelatihan sektor produksi.

## **8. BIDANG PROGRAM PEMERINTAH**

- Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Fraksi Partai Gerindra

menilai pentingnya pengawasan dan monitoring secara berkala perlu dilakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaannya memenuhi standar kebersihan, kualitas bahan pangan, serta keamanan konsumsi bagi anak-anak.

- Fraksi Partai Gerindra melalui Komisi B dan hasil paparan BPS terkait survei MBG, program ini secara umum memberi dampak positif terhadap peningkatan gizi anak serta perputaran ekonomi lokal. Namun Fraksi menekankan agar selalu memperhatikan penyajian yang lebih higienis, ketepatan distribusi mengingat setiap dapur harus menyiapkan 3.000 porsi setiap harinya dan menu harus sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

## **9. BIDANG PARIWISATA**

- Banyak ditemukan objek wisata hanya ramai sesaat, tidak mampu mempertahankan tingkat kunjungan wisatawan jangka panjang dikarenakan kurangnya kreativitas dan publisitas.

## **10. BIDANG KEPEMUDAAN & OLAHRAGA**

- Dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang menurun, maka desain pembinaan olahraga daerah perlu dikaji ulang dengan menerapkan desentralisasi atlet, pembinaan berdasar program yang ditentukan tanpa mengurangi kualitas. Dengan begitu, pembinaan olahraga dapat tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.

## **11. BIDANG KESEHATAN**

- Fraksi Partai Gerindra memandang agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pemerataan tenaga kesehatan, memperbaiki manajemen layanan BPJS, dan memastikan fasilitas kesehatan primer mampu melayani masyarakat secara cepat dan layak.

## **12. BIDANG MITIGASI BENCANA ALAM**

Mengingat kejadian gempa bumi di Kebumen (kedalaman 18 km) dan tanah longsor di Desa Pandanarum, Majenang Cilacap, Banjarnegara

yang menewaskan beberapa korban pada 22 November 2025, Fraksi Gerindra merekomendasikan penguatan sistem peringatan dini BMKG terintegrasi dengan BPBD provinsi, termasuk alokasi anggaran khusus untuk pemantauan geofisika dan evakuasi darurat di wilayah rawan seperti Pegunungan Selatan. Hal ini sejalan dengan prakiraan cuaca hujan lebat yang berpotensi memicu longsor lanjutan pada 23-24 November 2025.

### **13. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN**

- Sejalan dengan fokus Perubahan APBD 2025 yang mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan provinsi hingga akhir 2025, Fraksi Gerindra menekankan integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam setiap proyek infrastruktur, seperti penanaman vegetasi anti-erosi di lereng jalan rawan longsor dan konsultasi masyarakat adat. Ini merespons masukan pakar dalam Jateng Planning Outlook 2025 untuk pembangunan berkelanjutan.
- Di tengah pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 sebesar 4,96%, Fraksi Gerindra merekomendasikan penambahan gelaran forum investasi tahunan di Semarang untuk menarik investor asing di sektor teknologi dan data, dengan insentif pajak regional. Hal ini didukung kondisi sosial stabil dan SDM kompeten, sebagaimana disoroti Gubernur dalam upaya dongkrak investasi baru-baru ini.

### **14. BIDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**

- Fraksi Partai Gerindra mencatat masih maraknya kasus penipuan dan perdagangan orang berkedok penempatan pekerja migran ke Kamboja, Malaysia, dan negara lain sepanjang tahun 2025, dengan puluhan warga Jateng (terutama dari Brebes, Tegal, Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas) menjadi korban, terjebak dalam pekerjaan ilegal (online scam/call center judi) serta meminta pemulangan darurat. Kami mendorong Gubernur untuk:

- a) Memperkuat Satgas Pencegahan TPPO dan Perlindungan PMI Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Disnakertrans, BP2MI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi;
- b) Mengalokasikan anggaran khusus APBD 2026 untuk sosialisasi masif “Desa Migran Produktif dan Aman” di 200 kecamatan rawan serta pendirian Pos Layanan Terpadu PMI di Terminal Tipe A dan Pelabuhan;
- c) Memastikan pemulangan dan rehabilitasi korban yang masih tertahan di Kamboja (data November 2025 tercatat masih 47 warga Jateng) dilakukan secara cepat dan gratis melalui koordinasi intensif dengan Kemenlu dan KBRI Phnom Penh.

## **15. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

- Fraksi Partai Gerindra menyoroti masih minimnya anggaran operasional UPTD PPA di 23 kabupaten/kota serta keterbatasan sarana rumah aman bagi korban kekerasan. Mengingat tren kenaikan 18% kasus sepanjang 2025, kami merekomendasikan:
- Penambahan anggaran minimal Rp 15 miliar pada APBD 2026 untuk operasional UPTD PPA dan pendirian 10 rumah aman baru di wilayah aglomerasi (Semarang Raya, Solo Raya, Brebes-Tegal, dan Banyumas Raya);
- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPA berbasis kecamatan di 576 kecamatan se-Jawa Tengah mulai tahun 2026 dengan skema block grant Rp 50–75 juta per kecamatan per tahun, sehingga penanganan kasus dapat lebih cepat, terjangkau, dan dekat dengan masyarakat;
- Integrasi layanan pengaduan online “SAPAWARGI” (Sistem Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Jawa Tengah) dengan aplikasi LAPOR! dan call center 129.

***Saudara Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Anggota Dewan yang Kami Hormati***

Demikian pemandangan umum dari Fraksi Partai Gerindra, semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi masukan yang positif untuk pembangunan Jawa Tengah. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan meridhoi langkah kita semua untuk melaksanakan amanah yang mulia ini yaitu mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah.

Salam Indonesia Raya  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Semarang, 24 November 2025

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Ketua**

ttd

**Sudarsono S**

**Sekretaris**

ttd

**Dwi Yasmanto, S.TP**